

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berganti nama menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) (Shania, 2019). Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas pemerintahan yang memiliki kedudukan berada dibawah tanggung jawab gubernur melalui sekretaris daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 50 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan infrastruktur pemeliharaan bangunan, jembatan, dan penataan ruang wilayah.

Pesatnya perkembangan di era reformasi dan adanya dampak persaingan globalisasi medongkrak percepatan revolusi kinerja aparatur pemerintah di Indonesia (Telaumbanua, 2018). Aparatur sipil negara dituntut bekerja untuk lebih bersih cepat dan beretika agar lancarnya tugas pemerintah dan pembangunan. Tidak salah jika terjadinya peningkatan anggaran gaji pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan tujuan agar meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat, dan berkualitas (Rahman, 2017).

Gaji merupakan imbalan kompensasi yang wajib diterima oleh pekerja pada tanggal yang sama disetiap bulannya yang diberikan dari perusahaan/instansi pemerintah sebagai balas jasa yang telah diberikan oleh pekerja (Nilasari, 2016). Sistem pengajian bagi pegawai negeri sipil diatur kedalam UU Nomor 43 tahun 1999 maka setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan

beban pekerjaan serta tanggung jawabnya dan dalam Pasal 7 Ayat 3 gaji yang diterima pegawai negeri sipil harus mampu memicu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya (Telaumbanua, 2018). Umumnya dalam pemberian gaji dapat dilihat dari sistem penggajian. Menurut Mulyadi (2016), sistem penggajian ada 3 yaitu sistem skala tunggal, sistem skala ganda, dan sistem skala gabungan. Sistem skala tunggal yaitu sistem penggajian yang dimana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama tanpa memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan pegawai. Sistem skala ganda yaitu sistem penggajian dimana gaji yang diberikan dilihat berdasarkan prestasi yang dicapai, sifat pekerjaan, berat yang dipikul, dan tanggung jawab pekerjaan pegawai. Terakhir yaitu sistem skala gabungan, sistem ini diterapkan pada penggajian PNS di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dimana pembayaran gaji ditentukan berdasarkan pada berpangkat sama dan memperhatikan prestasi, berat tanggung jawab serta sifat pekerjaan pegawai.

Pembayaran gaji menjadi pendukung dalam motivasi kerja pegawai, terutama ketika tepatnya waktu pembayaran dan jumlah yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan. Membahas penggajian sangat sensitif dan bisa menimbulkan politis bagi penyelenggara pemerintah. Oleh itu baiknya ada transparansi mulai dari proses awal penggajian sampai akhir penerimaan oleh masing-masing pegawai (Telaumbanua, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **“Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat?
2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan penggajian di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur penggajian PNS yang ada di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan penggajian di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini, yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur penggajian terhadap Pegawai Negeri Sipil
 - b. Penulis mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan kedalam dunia kerja.
 - d. Penulis menerima banyak ilmu yang berharga dalam dunia kerja yang tidak diketahui oleh penulis sebelumnya.
2. Bagi instansi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam proses pemberian gaji di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Lokasi magang di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Barat, Jl. Taman Siswa No.1A Padang Utara. Waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 09 Januari s/d 10 Maret 2023 (40 hari kerja).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tempat, dan waktu penelitian serta sistematik penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan secara garis besar mengenai pengertian sistem informasi akuntansi, prosedur, gaji, dan golongan pegawai negeri sipil.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS BMCKTR PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada bab ini, penulis membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas bidang usaha.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan magang yang dilaksanakan selama 40 hari kerja, yaitu menguraikan tentang prosedur pembayaran gaji pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.